



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KUNINGAN
JL. MOCH. TOHA - KASTURI, KUNINGAN; TELEPON (0232) 877214; FAKSIMILE (0232) 870387; SUREL
KPPN147@PERBENDAHARAAN.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/KUNINGAN

Nomor : S-426/WPB.13/KP.08/2021 12 Oktober 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2021

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Mitra Kerja KPPN Kuningan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Periodisasi Akhir Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:
 - a. Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2021 dimulai pada bulan Oktober 2021;
 - b. Akhir tahun anggaran 2021 adalah bulan Desember 2021.
2. Untuk memastikan penerimaan negara dan pengeluaran negara tahun anggaran 2021 berjalan dengan lancar, kami mohon seluruh KPA Satker Mitra Kerja KPPN Kuningan agar mematuhi dan mempedomani ketentuan batas-batas penerimaan negara dan pengeluaran negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 (terlampir).
3. Satker diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen, kebenaran data supplier, data kontrak, dan penulisan SPM telah sesuai dengan ketentuan agar terhindar dari penolakan/pengembalian SPM.
4. Selain itu, Satker diminta untuk mengecek kebenaran penulisan nama rekening, nomor rekening, dan nama bank serta memastikan rekening masih aktif terutama pada pembayaran SPM PPNPN, Pihak ke-3 dan Bansos untuk menghindari terjadinya retur SP2D.

Demikian untuk dipedomani.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Kuningan



Ditandatangani secara elektronik
Abu Said Maha

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat



